



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2024

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR RIFI MALIGI TAHUN 2024

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Gedung Tomang Tol Plaza Ciledug Jl. Hos Cokroaminoto No. 1, Kel. Larangan Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang - Banten
Nomor Telepon	:	021-7300452
Penjelasan umum	:	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di PT BPR Rifi Maligi pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah disepanjang tahun 2024. PT BPR Rifi Maligi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik agar mampu bertahan dan menghadapi tantangan dan pengaruh kondisi ekonomi tahun 2024 yang diprediksi semakin berat. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Rifi Maligi didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ BPR dari seluruh tingkatan organisasi, terutama dari Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan tata kelola di lingkungan PT BPR Rifi Maligi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik diharapkan BPR Rifi Maligi dapat terus mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan stakeholder. Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal BPR Rifi Maligi berupaya terus memperbaiki penerapannya secara bertahap dan konsisten.
Peringkat Penilaian Komposit Sendiri Tata Kelola	Komposit sendiri (self assessment) Hasil Penilaian (Self Assesmenet)	Hasil : 2 - Baik
Penjelasan Komposit Sendiri Tata Kelola	Peringkat Hasil Penilaian (Self Assesmenet)	: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip

tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK : -
	Nama : Kimnadi
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas pokok Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut: 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. 2) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama: 1) Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi 2) Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam

		mencapai maksud dan tujuan Perseroan
		4) Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2	NIK	: -
	Nama	: Chen Tjen (B. Prajitno)
	Jabatan	: Direktur Operasional & Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas & tanggung jawab sebagai Direktur Operasional: 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 4. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional bank 6. Mendukung visi dan misi perusahaan dengan melakukan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus agar seluruh personel operasional dapat melaksanakan tugas penuh integritas dan transparan. 7. Membantu Direktur utama

	dalam memimpin perusahaan dan Menyusun rencana bisnis yang berkesinambungan. Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan: 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank 2) Mengusulkan kebijakan dan system prosedur yang akan ditetapkan oleh Direksi 3) Menetapkan system dan prosedur yang akan digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya. 8) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Direksi memperhatikan dan menerima arahan, masukan dari Dewan	

Komisaris dan Pemegang Saham dalam pengelolaan dana terutama yang berasal dari pinjaman linkage agar lebih maksimal meningkatkan laba dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga likuiditas dengan baik.

2. Direksi memperhatikan dan menerima arahan, masukan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam pengelolaan dana maupun penyaluran kredit agar tetap terjaga dengan baik dan terukur.
3. Direksi menerima arahan dan saran agar dalam pengawasan maupun penyelesaian kredit bermasalah lebih intensif, dan ditindaklanjuti agar dapat segera diselesaikan.
4. Direksi akan menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan OJK, dan berkomunikasi serta mengikuti arahan dari Pengawas OJK
5. Direksi menerima saran dan akan memperhatikan terhadap pelaksanaan APU PPT kepada seluruh SDM, memonitoring laporan-laporan APU PPT termasuk melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan dalam setiap tahunnya.
6. BPR akan melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi secara semesteran untuk mengedukasi terkait fungsi dan peran BPR di masyarakat sebagai lembaga jasa keuangan.
7. Direksi telah menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal kepada OJK, sebagai komitmen Pemegang saham dalam penguatan permodalan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	NIK : -
	Nama : Ricky Lukman
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan

	operasional BPR, kecuali terkait dengan: a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; 5) Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan 6) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain
--	--

	permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. 7) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. 8) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 9) Dewan komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS; 10) Dewan Komisaris wajib: - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali; - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR persemester kepada OJK; - Menyampaikan laporan evaluasi Kantor Akuntan Publik setiap tahun kepada OJK.
--	---

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Memberikan saran dan arahan kepada Direksi agar senantiasa menjaga likuiditas terkait penghimpunan dana dari BPR/bank lain yang setiap saat dapat dilakukan pencairan dana.
2. Memberikan saran dan arahan agar efisiensi biaya diperhatikan dan perolehan pendapatan ditingkatkan dengan penyaluran kredit mandiri dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko ketat.
3. Memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan action plan secara komprehensif agar dapat menyelesaikan kredit bermasalah dengan segera.
4. Memberikan arahan dan saran agar Direksi melakukan komunikasi serta pengawasan terhadap hasil audit dari OJK, temuan-temuan yang didapatkan agar menjadi bahan evaluasi sehingga setiap aktifitas kegiatan BPR sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.
5. Mengingatkan Direksi agar pelaksanaan APU PPT terus dilaksanakan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
6. Mengingatkan Direksi agar melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan untuk mengedukasi masyarakat terkait fungsi dan peran BPR di masyarakat.
7. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham berkomitmen akan melakukan setoran modal dalam penguatan permodalan BPR dan tetap menghimbau agar Direksi memperhatikan penguatan modal yang berasal dari laba sebagai penambahan modal secara organik ditingkatkan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantauan Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -

	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/tidak)
				Audit	Pemantauan risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen risiko	lainnya	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Kimnadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Chen Tjen (B.Prajitno)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Ricky Lukman	2.195.500.000,-	51,06	300.000.000,-	13,04

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Kimnadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Chen Tjen (B.Prajitno)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Ricky Lukman		PT Interusaha Sukses Mandira	10%
				PT Intersukses Graha Mandiri	30%
				PT Graha Multi Cipta Sentosa	90%
				PT Rifi Graha Sentosa	90%

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Kimnadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Chen Tjen (B.Prajitno)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ricky Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Kimnadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Chen Tjen (B.Prajitno)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ricky Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Jenny Tunggal Djaya – Ibu Kandung, Djaja

					Hendrawan – Kakak Ipar
--	--	--	--	--	---------------------------

G. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	2	Rp 900.000.000,-	1	Rp 162.000.000,-
2	Tunjangan			1	Rp 60.000.000,-
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi					
Jenis Fasilitas lain					
1	Perumahan				
2	Transportasi	2	Rp 840.820.680,-		
3	Asuransi Kesehatan	2	Rp 73.200.000,-		
4	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas lainnya					
Total Remunerasi dan Fasilitas lain			Rp 1.814.020.680,-		Rp 222.000.000,-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio Gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,80 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,12 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang Tertinggi (b)	2,75 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,09 : 1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	15-02-2024	2	- Evaluasi kinerja BPR periode Desember 2023, dan Januari 2024 - Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris - Pendapat, saran, dan arahan Dewan Komisaris

			berserta Pemegang Saham
2	12-06-2024	2	- Evaluasi kinerja BPR periode Mei 2024 - Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris - Pendapat, saran, dan arahan Dewan Komisaris berserta Pemegang Saham
3	12-11-2024	2	- Evaluasi kinerja BPR periode Oktober 2024 - Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris - Pendapat, saran, dan arahan Dewan Komisaris berserta Pemegang Saham

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	Ricky Lukman	3	0	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT. BPR RIFI MALIGI sebagaimana tabel sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan internal*) (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian **)	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAH HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR RIFI MALIGI selama tahun 2024 dan telah diajukan melalui proses serta upaya penyelesaian adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	1
Total	1	1

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut:

No	Pihak yang memiliki Benturan kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Di tahun 2024, BPR RIFI MALIGI tidak melakukan kegiatan social kepada pihak-pihak tertentu. Sebagaimana table berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (social/ politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-	-

**LEMBAR PESETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR RIFI MALIGI
PERIODE TAHUN 2024**

Tangerang, 14 Februari 2025
PT. BPR RIFI MALIGI

 <u>Kimnadi</u> Direktur Utama		 <u>Bambang Prajitno</u> Direktur
--	---	--

Menyetujui


Ricky Lukman
Komisaris Utama